

Mahkamah Agung Kabulkan Gugatan Warga Kedungombo

Jakarta, Kompas

Setelah sekitar empat tahun memperkarakan tanah dan rumahnya yang terambil untuk proyek Waduk Kedungombo, warga akhirnya boleh sedikit lega. Mahkamah Agung dalam putusan kasusnya terhadap gugatan 34 warga Kedungombo menyatakan bahwa dalam perkara ini Gubernur Jawa Tengah sebagai pihak tergugat, telah melakukan tindakan melawan hukum.

Majelis hakim agung yang terdiri Asikin Kusumah Atmadja (selaku ketua), bersama HAM Manrapi dan RL Tobing menyatakan hal itu dalam rapat musyawarah 28 Juli 1993. Risalah putusan yang baru diterima kuasa hukum penggugat, Soemedi Prawirodirdjo dari LBH Semarang Selasa (5/7) menyebutkan antara lain bahwa pemerintah harus membayar ganti rugi kepada warga sebesar Rp 50.000/meter persegi untuk tanah dan bangunan, serta Rp 30.000/meter per segi untuk tanaman. Sementara untuk kerugian lain yang sifatnya immateriil, Mahkamah Agung sesuai dengan gugatan yang diajukan, menghukum tergugat untuk membayar Rp 2 milyar.

Putusan lembaga tertinggi peradilan ini sekaligus membatalkan putusan sebelumnya dari pengadilan negeri maupun pengadilan tingkat banding yang pada intinya menolak gugatan warga Kedungombo. Bahkan dibanding dengan besarnya tuntutan penduduk, ganti rugi yang ditetapkan Mahkamah Agung justru lebih tinggi. Warga ketika menggugat empat tahun lalu, minta ganti rugi Rp 10.000 per meter persegi.

Gugatan Citroreji Wagiman

dan kawan-kawan, warga Kedungombo dilancarkan tahun 1990. Melalui kuasa hukum mereka dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan LBH Semarang mereka mempersoalkan pembebasan tanah mereka yang dirasakan tidak mengindahkan ketentuan yang ada. Proses musyawarah yang seharusnya dilakukan, menurut warga tidak pernah terjadi. Warga menilai dalam pembebasan itu suara mereka tidak pernah didengar. Belum lagi ada kata sepakat, warga sudah dipaksa meninggalkan rumah dan pekarangannya, dengan ganti rugi yang ditetapkan sepihak, lalu uang ganti rugi begitu saja dititipkan di pengadilan.

Pengaruh psikologis

Majelis hakim agung berpendapat bahwa dalam perkara ini, musyawarah memang belum dipenuhi. Bukti foto yang disodorkan pihak tergugat berisi gambar pertemuan yang dihadiri juga oleh warga, menurut majelis hakim agung tidak membuktikan tentang adanya musyawarah. Gambar dalam bentuk foto tersebut dianggap hanya sebagai *moment opname*.

Sementara kehadiran unsur muspida dalam pertemuan itu menurut majelis, secara psikologis mempunyai pengaruh ti-

dak baik terhadap maksud diadakannya musyawarah. Warga menjadi kurang leluasa melakukan musyawarah yang dihadiri oleh pejabat keamanan setempat. Demikian antara lain pendapat majelis hakim agung tentang proses musyawarah dalam penentuan ganti rugi tersebut.

Lewat putusannya tersebut, majelis hakim agung juga tidak bisa menerima tindakan konsinyasi (penitipan uang ganti rugi yang biasanya dialamatkan di pengadilan) sebelum kesepakatan tercapai. Sistem konsinyasi yang selama ini hampir selalu dipraktikkan dalam soal pembebasan tanah, dianggap majelis hakim agung ini, bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. "Konsinyasi ini bertentangan dengan asas musyawarah yang seharusnya dilakukan," demikian majelis hakim agung.

Lebih jauh dari tindakan sepihak yang akhirnya memaksa warga untuk pergi meninggalkan rumah, pekarangan, dan kebunnya, majelis mengabulkan ganti rugi immateriil sebanyak Rp 2 milyar. Ganti rugi ini menurut majelis merupakan pengganti dari kesenangan hidup penduduk yang hilang karena mereka dipaksa harus pindah. Meski warga dalam gugatannya sama sekali tidak mencantumkan jumlah tuntutan ganti rugi untuk kerugian immateriil, tapi ini merupakan wujud dikabulkannya gugatan warga yang minta sebuah putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Masih banyak Koordinator kuasa hukum dalam perkara Kedungombo, Mas Achmad Santosa SH LLM yang dihubungi, Rabu di Semarang mengatakan, warga Kedungombo yang hadir di kantor LBH, merasa sangat gembira dengan putusan ini.

Menurut hematnya, putusan ini bukan saja mencerminkan rasa keadilan bagi warga Kedungombo, tapi lebih dari itu lewat kajian-kajian dan pertimbangan-pertimbangannya, putusan ini bisa memperkaya ilmu pengetahuan hukum di Indonesia. "Pertimbangan yang mendasari putusan tersebut, sangat bernutu," katanya.

Antara lain ia menggarisbawahi soal prosedur musyawarah serta lembaga konsinyasi yang telah sedemikian rupa dikupas dalam putusan majelis mahkamah agung ini.

LBH Semarang dalam siaran persnya yang dikeluarkan oleh Puspo Adji SH (direktur dan Drs Djoko Hadi Satyoga (Kepala bidang Operasional) berharap agar terhadap masyarakat Kedungombo yang telah memberi kuasa hukum kepada LBH Semarang dan Yogyakarta, dapat diberlakukan prinsip-prinsip serupa. Artinya, diharapkan tanpa harus menempuh gugatan pengadilan, prinsip yang ada dalam putusan tersebut bisa diambil untuk penyelesaian tuntas kasus Kedungombo. (rel)

コンパス紙1994年7月7日(木)6面

(仮訳)

最高裁判所クドゥン・オンボ住民の訴えを認める

[ジャカルタ発 コンパス紙]

クドゥン・オンボ・ダムプロジェクトにより土地、家を奪われたことに対する訴訟から約4年、住民はやっとわずかながらの安堵を手にした。クドゥン・オンボの34世帯の訴えに対し、最高裁判所はその被告である中部ジャワ州知事が違法行為を行ったとの判決を下した。

アシキン・クスマ・アトマジャ氏(判事長)、A. M. マラビ氏、RTトビン氏からなる最高裁判所判事は、1993年7月28日付けの審議において、判決を下していた。

その判決文は火曜(1994年7月5日)に原告側弁護人であるスマラン法律援護機関スメディ・プラウィロディルジョが受け取ったばかりである。その判決文では政府は原告側住民に対して家屋・土地1平方メートルにつき5万ルピア、作物1平方メートルにつき3万ルピアを支払わなくてはならないとしている。。一方非物質的補償として訴えについては、最高裁は20億ルピアの支払いの判決をくだした。

この最高裁の決定は同時にこのクドゥン・オンボ住民の訴えを却下した地方裁判所、高等裁判所の判決を無効にするものである。そのうえ、今回最高裁が決定した補償額は、住民の要求額を上回るものである。住民は4年前、1平方メートルあたり1万ルピアを要求していた。

クドゥン・オンボ住民のチトゥロレジ・ワギマン氏とその仲間たちは訴えを1990年に起こした。インドネシア法律援護機関財団(YLBHI)、スマラン法律援護機関(LBH Semarang)の弁護士を通じて、彼らは土地の手放しが現行の規定を無視したものであるという点を問題にしていた。住民によれば本来行われるべき協議過程は行われなかった。住民は土地を手放すうえで、彼らの声が聞き入れられなかったと認識している。同意を得ないうちに、住民は一方的に決められた補償で家屋、屋敷地を手放さざるを得なかった。

(心理的影響)

最高裁判事はその件に関して協議は十分なものではなかったという見解を示した。

被告側から提出された住民の出席した会合の証拠写真は、最高裁判事によれば協議が行われたという証拠にはならず、一時的なスナップ写真にすぎないと判断された。

一方、その会合における地域代表者（治安当局者を含む）の出席は判事によれば協議によくない心理的影響を及ぼす。地域治安当局者の同席によって住民は自由な協議を行いきくい。補償決定における協議過程において最高裁判事は以上の見解をのべた。

その判決において最高裁判事はまた、同意が得られる以前の金銭の委託（普通は裁判所宛てに補償金を預けること）は受け入れられないとしている。この間、土地収用について行われてきたほとんどの委託制度は、最高裁の見解によれば現行の法律、法令に違反するものである。「この委託は本来行われるべき協議の原則に違反する」と最高裁判事は述べている。最終的結果として住民に家、屋敷地、農園を手放すよう強制した一方的行為について、最高裁判事は20億ルピアの非物質的補償を認めた。その補償は最高裁によれば移転を強制されたため失われた生活の平穏を代償するものである。住民は告訴内容の中に非物質的の補償要求額を提示していないにもかかわらず、その決定は、住民のできるかぎりの公正な決定を求めた訴えが認められ具現化したものである。クドゥン・オンボ訴訟の弁護人代表であるマス・アハマッド・サントサ弁護士に水曜日にスマランに問い合わせたところ、法律援護機関を訪れたクドゥン・オンボの住民はその判決にたいしとても喜んでいると答えた。

彼の意見によれば、この判決はクドゥン・オンボの住民の正義を反映しただけでなく、それ以上にまたこの判決内容を分析し考慮することによって、インドネシアにおける法科学を発展させることができる。「その判決の基礎になる見解は非常に卓越したものである。」と彼は述べた。そのほか、協議の手続きおよび委託機関が最高裁決定において分析されたことも重要であると述べた。スマラン法律援護機関は、プスボ・アジ弁護士（同協会代表）、ジョコ・ハディ・サティヨガ氏（同協会実行委員長）によって流されたプレス・リリースの中で、他のクドゥン・オンボ住民がスマランとジョクジャカルタの法律援護機関に援護を求めている問題に対しても今回と同じ原則が適応されることを期待している。それはつまり、裁判所訴訟によらずとも今回の判決の原則がクドゥン・オンボ問題を解決するために用いられることを要望しているということである。

Update on the Deadly. Kedung Ombo Resettlement Fiasco

by Patrick McCully, January 1995 *

In early November 1994 Indonesia's Supreme Court made the highly unusual decision to cancel its own ruling on compensation for farmers who lost land to the World Bank-funded Kedung Ombo Dam in central Java. The decision is a serious setback to the farmers' five-year legal battle for increased compensation, and casts serious doubts over the integrity and independence of the Supreme Court.

The World Bank approved a U.S. \$156 million loan for Kedung Ombo in 1985. The dam was intended to irrigate 60,000 hectares and generate 225 megawatts of electricity, and it would have required the resettlement of 5,390 families. Over the next four years local and international nongovernmental organizations (NGOs) warned the World Bank that the majority of the affected people were extremely unhappy with the compensation offered, which was only about one-tenth the market value of local land. The villagers were also angry that they had not been adequately consulted about the project. According to the villagers, resettlement land that was later made available was unfit for cultivation, had no drinking water, and was virtually inaccessible by road.

The World Bank, however, preferred to believe the Indonesian government's glib assurances that everyone was being properly compensated and that resettlement was proceeding smoothly. With World Bank assent the Indonesian government started to fill the reservoir in January 1989, despite the fact that over 1,500 families were still living in four submerged zone villages. As the water rose with each rain storm over the following months, the families moved onto rafts or into trees; some got stranded on newly formed islands; others shifted as much of their houses and belongings as they could rescue onto higher ground, only to be flooded out again as the reservoir rose further. By June of that year eight people had drowned.

Harassment and intimidation of local villagers and activists by local government officials and the military was stepped up as the waters rose. Students and journalists were allowed to speak to the residents only under official police supervision. National and international NGOs appealed in vain for the World Bank to request the reservoir filling be stopped and to help negotiate improved compensation. In 1994 around a thousand oustees were still living on the edge of Kedung Ombo Reservoir and waiting to be compensated and provided with replacement land.

The botched resettlement at Kedung Ombo flagrantly broke the World Bank's own 1980 policy guidelines on involuntary resettlement. Among the requirements of the policy are that there should be direct consultation with the people to be affected, and that they should be provided with the means to at least restore their previous standard of living. According to the International NGO Forum on Indonesian Development, "there are no cases of involuntary resettlement in World Bank-financed projects in Indonesia where adequate consultation with displaced communities took place before project appraisal." Furthermore, the forum stated, "a majority of people displaced by [Kedung Ombo] have not regained their standard of living."

As the water rose with each rain storm over the following months, the families moved onto rafts or into trees; some got stranded on newly formed islands; others shifted as much of their houses and belongings as they could rescue onto higher ground, only to be flooded out again as the reservoir rose further.


After having their complaints of unfair compensation turned down by two lower courts in 1990 and 1991, the villagers brought their case to the Supreme Court with the help of the Legal Aid Institute. The original ruling granted around 9 billion rupiah (U.S. \$3.9 million) to thirty-four households for the flooding of land, buildings, and crops and for the insecurity they endured after losing their homes. The Supreme Court made its decision in July 1993, but it was not made public until a year later.

The first Supreme Court ruling granted the families five times more compensation than they had asked for and was seen as a great victory by NGOs and public-interest lawyers. The authorities, however, were furious: the regional administration and attorney general both requested that the Supreme Court review its decision, and President Suharto reportedly met with the chief justice to back up their request. Despite the pressure, the Legal Aid Institute thought that the Supreme Court's decision would eventually have to be implemented and was taken by surprise when the chief justice suddenly announced that the Supreme Court had made a mistake in

*Patrick McCully is the campaigns director of the International Rivers Network, 1847 Berkeley Way, Berkeley, CA 94703, U.S.A. Telephone, (510) 848-1155; fax, (510) 848-1008; email, im@igc.apc.org. He is currently writing a book on the social, ecological, economic, technical, and political aspects of large dams.

granting more compensation than had been requested, and that the decision could no longer stand.

"The cancellation of the Supreme Court decision, which means closing down the Kedung Ombo Dam case, is a very unjust decision for the people of Kedung Ombo, who have

 This image is currently not available for viewing

Houses submerged as the reservoir fills behind Kedung Ombo Dam. As with many other World Bank infrastructure projects, compensation packages for those displaced have been grossly inadequate. This photo is reprinted here courtesy of the International Rivers Network

undergone a prolonged moral and material loss," said the International NGO Forum on Indonesian Development in a statement issued in Jakarta on 11 November 1994. "The people of Kedung Ombo have, again, to wait for an uncertain time to gain justice and proper compensation."

-86-

Questia Media America, Inc. www.questia.com

Publication Information: Article Title: Update on the Deadly. Kedung Ombo Resettlement Fiasco. Contributors: Patrick McCully - author. Journal Title: Bulletin of Concerned Asian Scholars. Volume: 26. Issue: 4. Publication Year: 1994. Page Number: 86. This material is protected by copyright and, with the exception of fair use, may not be further copied, distributed or transmitted in any form or by any means.

The Questia.com advertising network includes:

命に関わるクドゥン・オンボ再定住失策の最新情報

1995年1月、パトリック・マッカーリー*

1994年11月の早い時期、インドネシア最高裁判所は、中央ジャワにおける世界銀行に融資されたクドゥン・オンボ・ダムに土地を奪われている農夫への補償について、自らの裁決を取り消す極めて珍しい判決を下した。判決は、補償増額のための農夫の5年間の法的闘争に対する深刻な逆行であり、最高裁判所の高潔と独立に対する重大な疑惑を投げかける。

世界銀行は、1985年にクドゥン・オンボに1億5600万米ドルの融資を承認した。ダムは、60,000ヘクタールを灌漑し、225メガワットの電気を発電することを意図したものであった。そして、それは5,390家族の再定住を必要とすることとなった。その後の5年以上、地元及び国際的な非政府組織(NGOs)は、影響を受けた人々の大多数は、約束された補償のせいで極めて悲惨であったと世界銀行を警告した。それは、だいたい地元地域の市場価格のたった10分の1であった。村人はまた、彼らがプロジェクトについて適切に顧慮されてこなかったことに怒っていた。村人によれば、後に利用可能となった再定住地は、耕作に不向きであり、飲料水はなく、事実上陸路で行くことができなかった。

しかしながら、世界銀行は、全員が適切に補償され、再定住地は円滑に進行している、と調子よく保証したインドネシア政府を信用することを選んだ。世界銀行の同意によって、インドネシア政府は、1,500を超える家族が未だに4つの浸水地帯村に住んでいるという事実にもかかわらず、1989年1月に貯水池の湛水を開始した。翌月以降、暴風雨のたびに水位が上昇するにつれて、家族はいかだや木々に移動した；何名かは新しく形成された島に取り残された；他の何名かは、貯水池がさらに上昇につれて、再び立ち退かされることになるためだけに、彼らがより高い土地に救うことができた限りの彼らの家と家財の多くを移した。その年の6月までに8名の人々が溺死してしまった。

地元政府役人と軍隊による地元の村人と活動家に対する嫌がらせと脅迫は、水位の上昇につれてだんだんと強まっていった。学生とジャーナリストは、警察官の監督の下でのみ住民と話すことを許された。国内及び国際的なNGOは、世界銀行が貯水池の湛水を止め、補償改善交渉を援助するよう、いたずらに懇願した。1994年、約1000人の排除された人々は、まだクドゥン・オンボ貯水池の縁に住んでいた。そして、補償され、代替地が提供されることを欲していた。

クドゥン・オンボでの台無しにされた再定住地は、非自発的再定住における世界銀行自身の1980年の政策ガイドラインを明らかに破った。政策の必要条件の中には、影響を受ける人々との直接的な協議があるべきであり、彼らは少なくとも彼らの以前の生活水準を取り

戻すための資金が提供されるべきであるということがある。インドネシアの開発における国際的 NGO フォーラムによれば、“プロジェクトの事前審査以前に立ち退かされた共同体との適切な協議が行われたのは、インドネシアの世界銀行融資プロジェクトにおける非自発的再定住のケースにはない”ということである。さらに、フォーラムは“[クドゥン・オンボ]によって立ち退かされた人々の大多数は、彼らの生活水準を取り戻していない”と明言した。

翌月以降、暴風雨のたびに水位が上昇するにつれて、家族はいかだや木々に移動した；何名かは新しく形成された島に取り残された；他の何名かは、貯水池がさらに上昇につれて、再び立ち退かされることになるためだけに、彼らがより高い土地に救うことができた限りの彼らの家と家財の多くを移した。

1990年と1991年に2つの下級法廷によって彼らの不公平な補償への告訴が却下された後で、村人は、法律扶助協会の援助で彼らの訴訟を最高裁判所に提起した。最初の判決は、34世帯に対して、浸水した土地、建物、農作物、そして彼らが家庭を失った後に耐えてきた不安感に対する約9,000,000,000(90億)ルピア(3,900万米ドル)を与えた。最高裁判所は、1993年にその判決を下した。しかし、それは1年後まで公表されなかった。

最初の最高裁判決は、家族に彼らが要求したより5倍多い補償を与えた。そして、それは、NGOと公共の利益弁護士による偉大な勝利と見られた。しかし、権力は怒り狂った：地方行政機関と司法長官の両者は、最高裁にその判決の見直しを要請した。そして、報道によればスハルト大統領は、彼らの要請をバックアップするために裁判長に会った。圧力にもかかわらず、法律扶助協会は最高裁の判決がいつかは実施されなければならないと考えた。そして裁判長が突然、最高裁判所が要求より5倍多い補償を与えたことで誤りを犯した、判決はもはや有効ではないと発表した時に、彼らはびっくりさせられた。

“最高裁判所の判決の取り消し、それはクドゥン・オンボ・ダム裁判の終了を意味する、それはクドゥン・オンボ・ダム貯水池の湛水で家を沈められたクドゥン・オンボの人々に対する非常に不当な判決である。多くの他の世界銀行インフラプロジェクトと同様に、立ち退かされた彼らに対する補償パッケージは、甚だしく不適切であった。この写真は、延長された道徳的で、物質的な損失を受けられた国際的河川ネットワークの好意により転載した。”1994年11月にジャカルタで公布された声明でインドネシアの開発における国際的 NGO フォーラムは語った。“クドゥン・オンボの人々は、正義と適切な補償を得るために、再び不確かな時間を待たなければならない。”

* パトリック・マッカーシーは国際的河川ネットワークのキャンペーン・ディレクターである。米国、CA 94703, バークレー、バークレー地方 1847 電話, (510)848-1155; fax, (510)848-1008; email, im@lgc.apc.org. 彼は最近、巨大ダムの社会的、生態学的、経済的、技術的、政治的様相に関する本を書いている。